

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, terutama di daerah pedesaan, di mana mayoritas penduduk masih menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Menurut teori pembangunan pertanian dari John Mellor (1976), sektor pertanian berperan ganda dalam pembangunan ekonomi, baik sebagai penyedia lapangan kerja maupun sebagai penghasil bahan pangan yang berkontribusi langsung terhadap ketahanan pangan nasional. Di Kabupaten Pinrang, sektor pertanian, khususnya tanaman pangan seperti padi, menjadi tumpuan utama ekonomi daerah, di mana sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani. Kabupaten Pinrang dikenal sebagai lumbung padi di Sulawesi Selatan, namun peningkatan kesejahteraan petani masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Menurut Mellor, pembangunan pertanian yang berhasil tidak hanya diukur dari peningkatan produksi, tetapi juga dari peningkatan kesejahteraan petani. Teori ini relevan dengan kondisi di Kabupaten Pinrang, di mana meskipun produksi padi cukup tinggi, banyak petani yang masih menghadapi masalah klasik, seperti fluktuasi harga komoditas, akses pasar yang terbatas, keterbatasan modal, dan ketergantungan pada komoditas tunggal. Selain itu, perubahan

iklim yang semakin ekstrem juga mempengaruhi pola tanam dan hasil produksi, sehingga membuat pendapatan petani tidak stabil.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Pinrang telah meluncurkan Program Pertanian Terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Program ini didasarkan pada konsep Integrated Farming System (IFS), yang menekankan pada integrasi berbagai jenis usaha tani dalam satu sistem pertanian yang efisien dan ramah lingkungan. Sistem ini memadukan berbagai sub-sektor, seperti tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan dalam satu kesatuan usaha tani, dengan tujuan untuk memaksimalkan produktivitas lahan, mengurangi risiko usaha tani, dan menciptakan sumber pendapatan yang lebih beragam bagi petani.

Berdasarkan teori pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh Gro Harlem Brundtland (1987), pembangunan pertanian harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Pemerintah Kabupaten Pinrang menerapkan prinsip ini dalam program pertanian terpadu dengan memberikan perhatian pada kelestarian lingkungan melalui pengurangan penggunaan bahan kimia sintetis dan penerapan sistem pertanian organik. Petani didorong untuk memanfaatkan pupuk organik dan melakukan diversifikasi tanaman guna meningkatkan daya tahan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi

pasar. Diversifikasi ini sesuai dengan Teori Diversifikasi Pertanian (Ruthenberg, 1971), yang menyatakan bahwa mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman dapat meningkatkan ketahanan petani terhadap risiko gagal panen dan meningkatkan pendapatan.

Selain itu, program pertanian terpadu di Pinrang juga mencakup pengembangan infrastruktur pertanian, seperti peningkatan jaringan irigasi, pembangunan lumbung pangan, dan penyediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang modern. Pemerintah daerah juga berperan dalam memperluas akses petani terhadap modal usaha melalui program kredit usaha tani (KUR) yang disubsidi pemerintah, serta pelatihan bagi petani agar dapat mengelola lahan mereka secara lebih produktif dan efisien. Ini sejalan dengan Teori Penyuluhan Pertanian (Rogers, 1983), yang menekankan pentingnya penyebaran inovasi dan teknologi baru melalui program pelatihan dan penyuluhan guna meningkatkan kapasitas petani dalam mengadopsi teknologi pertanian modern.

Menurut data BPS Kabupaten Pinrang (2022), sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah ini, dengan kontribusi lebih dari 40%. Namun, tingkat kemiskinan di kalangan petani masih cukup tinggi. Dalam laporan terbaru, sekitar 12-15% penduduk Kabupaten Pinrang berada di bawah garis kemiskinan, dan

mayoritas dari mereka adalah petani. Peningkatan kesejahteraan petani menjadi target utama Pemerintah Daerah melalui program pertanian terpadu.

Sementara Data Produktivitas Pertanian dan Ketergantungan pada Komoditas Utama menunjukkan bahwa Kabupaten Pinrang merupakan salah satu lumbung padi di Sulawesi Selatan, dengan luas lahan sawah mencapai sekitar 50.000 hektar. Meskipun demikian, produktivitas rata-rata masih di bawah potensi optimal. Produktivitas padi mencapai 5-6 ton per hektar, padahal dengan teknologi modern dan manajemen yang baik, potensi produktivitas bisa mencapai 7-8 ton per hektar. Upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian ini termasuk dalam program pertanian terpadu, dengan fokus pada peningkatan kapasitas petani dan diversifikasi komoditas. (Sumber: Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Pinrang, 2023).

Kemudian Dampak Program Pertanian Terpadu terhadap Kesejahteraan Petani Menurut evaluasi Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Pinrang (2023), program pertanian terpadu telah meningkatkan pendapatan petani hingga 15% dalam tiga tahun terakhir. Ini terjadi terutama pada petani yang berpartisipasi dalam program diversifikasi tanaman dan modernisasi teknologi pertanian. Keberhasilan program ini mencerminkan peran signifikan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan

petani melalui pendekatan yang lebih holistik. Berikut ini merupakan luas panen dan produksi pertanian di Kabupaten Pinrang dalam kurang waktu tiga tahun terakhir.

Tabel 1.1. Luas dan Produksi panen pertanian Kabupaten Pinrang 2021-2023

No	Tanaman	Luas Panen (Ha)			Produksi (Ton)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Padi	108.594	105.569	94.602	660.252	747.326	569.436
2	Jagung	14.320	12.548	9.297	93.082	76.883	51.818
3	Kedelai	90	50	38	201	102	56
4	Kacang Tanah	7	16	111	7	16	3.608
5	Ubi Jalar	26	27	10	312	325	11
6	Ubi Kayu	111	84	15	4.740	3.586	165
7	Kacang Hijau	13	5	8	16	6	10

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Pinrang, 2024

Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, terjadi fluktuasi yang signifikan dalam luas panen dan produksi pertanian di Kabupaten Pinrang. Tanaman pangan utama, terutama padi dan jagung, mengalami penurunan yang cukup besar, baik dalam hal luas lahan panen maupun total produksinya.

Padi, yang merupakan komoditas utama di Kabupaten Pinrang, menunjukkan penurunan luas panen dari 108.594 hektar pada tahun 2021 menjadi 94.602 hektar pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2022 produksi padi sempat meningkat hingga 747.326 ton, angka tersebut kembali turun drastis pada tahun 2023 menjadi hanya 569.436 ton. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh

berbagai faktor seperti perubahan iklim, penggunaan lahan, atau masalah terkait irigasi.

Jagung juga menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2021, luas panen jagung tercatat sebesar 14.320 hektar dengan produksi mencapai 93.082 ton. Namun, pada tahun 2023, luas panen menurun menjadi hanya 9.297 hektar dengan produksi turun drastis menjadi 51.818 ton. Penurunan produksi jagung dapat menjadi indikasi adanya perubahan pola tanam atau tantangan dalam budidaya yang dialami petani di Kabupaten Pinrang.

Kedelai, yang merupakan salah satu tanaman legum penting, juga mengalami penurunan produksi yang signifikan. Dari 201 ton pada tahun 2021, produksi kedelai menurun menjadi 56 ton pada tahun 2023, dengan luas panen yang semakin berkurang dari 90 hektar menjadi hanya 38 hektar. Hal ini mungkin mencerminkan menurunnya minat petani terhadap budidaya kedelai karena berbagai kendala, seperti harga yang tidak menguntungkan atau perubahan preferensi tanaman.

Sebaliknya, kacang tanah mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023. Dari luas panen yang hanya 7 hektar pada tahun 2021, tanaman ini berkembang menjadi 111 hektar pada tahun 2023. Produksi kacang tanah melonjak dari hanya 7 ton menjadi 3.608 ton pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa kacang tanah mungkin menjadi komoditas yang semakin diminati

oleh petani setempat, mungkin karena keuntungan ekonomis atau kesesuaian dengan kondisi lahan dan iklim.

Namun, tanaman lain seperti ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan drastis. Luas panen ubi kayu, yang pada tahun 2021 mencapai 111 hektar, turun drastis menjadi hanya 15 hektar pada tahun 2023, dengan produksi yang menyusut dari 4.740 ton menjadi hanya 165 ton. Ubi jalar juga menunjukkan tren penurunan, dengan luas panen pada tahun 2023 tercatat hanya 10 hektar dan produksi yang hanya mencapai 11 ton.

Sementara itu, kacang hijau mengalami fluktuasi dalam hal luas panen dan produksi. Meski perubahan ini tidak terlalu signifikan dibandingkan komoditas lain, produksi kacang hijau tetap rendah sepanjang tiga tahun tersebut, berkisar antara 6 hingga 16 ton.

Secara keseluruhan, data pada tabel 1.1. menggambarkan adanya tantangan besar dalam sektor pertanian di Kabupaten Pinrang selama tiga tahun terakhir. Tanaman pangan utama seperti padi, jagung, dan kedelai menunjukkan penurunan produksi yang cukup signifikan. Hanya kacang tanah yang berhasil menunjukkan peningkatan luas panen dan produksi. Tantangan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, pergeseran preferensi komoditas, atau masalah teknis di sektor pertanian, sehingga membutuhkan intervensi kebijakan dan dukungan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Secara empiris, implementasi program ini telah memberikan dampak positif bagi petani di Kabupaten Pinrang. Sebagai contoh, pada tahun 2023, produktivitas padi di beberapa desa yang menerapkan sistem pertanian terpadu meningkat hingga 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Tidak hanya itu, pendapatan petani juga meningkat karena mereka mulai memadukan usaha peternakan atau perikanan dengan usaha taninya. Kombinasi usaha ini membantu petani untuk tidak terlalu bergantung pada satu komoditas, sehingga ketika harga padi turun, petani masih memiliki sumber pendapatan lain dari hasil ternak atau ikan.

Namun, keberhasilan program ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi sebagian petani terhadap perubahan. Sebagian petani, terutama yang sudah terbiasa dengan cara-cara tradisional, merasa sulit untuk mengadopsi teknologi dan sistem baru yang ditawarkan oleh pemerintah. Selain itu, masih ada kendala dalam distribusi alat dan mesin pertanian, serta kurangnya akses pasar yang kompetitif bagi hasil pertanian. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah terus berupaya memperkuat kelembagaan petani melalui pembentukan kelompok tani dan koperasi yang dapat membantu petani dalam hal pemasaran, akses modal, dan penyuluhan teknologi.

Dalam konteks ini, program pertanian terpadu juga bersandar pada pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan

oleh Robert Chambers (1997), di mana petani tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam pembangunan. Melalui kelompok tani, petani didorong untuk saling berbagi pengetahuan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan secara kolektif mengelola sumber daya yang mereka miliki. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang mendukung inisiatif petani dengan menyediakan sarana, pelatihan, serta akses kepada teknologi dan pasar yang lebih luas.

Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sejauh mana petani dapat beradaptasi dengan perubahan dan seberapa efektif pemerintah daerah dalam menyediakan dukungan yang dibutuhkan. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat tani sendiri, untuk mewujudkan kesejahteraan petani yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kabupaten Pinrang, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki basis ekonomi yang kuat pada sektor pertanian. Sebagian besar penduduk di daerah ini bekerja sebagai petani, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan komoditas hortikultura lainnya. Namun, meskipun sektor pertanian menjadi penopang utama ekonomi daerah, kesejahteraan petani seringkali berada dalam tingkat yang masih belum optimal. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (1) Kurangnya Teknologi dan Inovasi

Pertanian. Teknologi pertanian yang digunakan oleh petani masih bersifat tradisional, yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang telah menyadari pentingnya penerapan teknologi modern untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, sehingga program pertanian terpadu mulai diperkenalkan. (2) Fluktuasi Harga dan Pasar yang Tidak Stabil. Harga komoditas pertanian yang sering fluktuatif, terutama untuk produk seperti padi dan jagung, membuat pendapatan petani tidak stabil. Hal ini menyebabkan ketidakpastian ekonomi di kalangan petani. Program pertanian terpadu dirancang untuk memberikan dukungan dalam mengakses pasar yang lebih stabil, termasuk kemudahan distribusi dan akses langsung ke pasar konsumen. (3) Akses Terbatas terhadap Modal dan Layanan Kredit. Salah satu hambatan utama yang dihadapi petani di Kabupaten Pinrang adalah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan, seperti modal usaha atau kredit pertanian. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memberikan akses kredit dengan bunga rendah sebagai bagian dari program pertanian terpadu, guna mendukung peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan petani. (4) Kendala Infrastruktur dan Sarana Pertanian. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti akses jalan menuju lahan pertanian dan irigasi yang tidak merata, juga menjadi tantangan yang signifikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang

melalui program pertanian terpadu telah memfokuskan perbaikan infrastruktur, seperti pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta perbaikan jalan tani untuk mendukung distribusi hasil panen.

(5) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Peningkatan kesejahteraan petani juga bergantung pada keberlanjutan penggunaan lahan dan sumber daya alam. Penggunaan lahan secara intensif tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dapat menyebabkan degradasi lahan. Pemerintah Daerah telah memperkenalkan praktik pertanian ramah lingkungan dalam program pertanian terpadu, termasuk pelatihan bagi petani untuk menerapkan teknik budidaya yang lebih berkelanjutan. (6)

Kolaborasi dengan Stakeholder Lain. Program pertanian terpadu di Kabupaten Pinrang melibatkan banyak pihak, mulai dari Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura, kelompok tani, hingga pihak swasta dalam penyediaan teknologi dan dukungan finansial. Pemerintah Daerah telah membentuk sinergi yang baik dengan berbagai stakeholder untuk memastikan keberhasilan program ini, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani secara holistik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI PROGRAM PERTANIAN TERPADU DI KABUPATEN PINRANG”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam Merumuskan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan penyediaan alat mesin pertanian?
2. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam Penyuluhan pertanian dalam meningkatkan kapasitas petani dalam penerapan teknologi dan praktek pertanian yang baik?
3. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam Menyediakan sarana dan prasarana pertanian?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran dari rumusan masalah diatas, maka peneliti merumuskan tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah dalam Merumuskan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, dan penyediaan alat mesin pertanian?
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah dalam Penyuluhan pertanian dalam meningkatkan kapasitas petani dalam penerapan teknologi dan praktek pertanian yang baik?
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah dalam Menyediakan sarana dan prasarana, seperti

distribusi pupuk, asuransi usaha tani, dan bantuan peralatan pertanian?

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa perspektif tambahan bagi anggota akademis program studi ilmu pemerintahan, yang akan menjadi materi penting dalam studi Ilmu Pemerintahan terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani melalui program pertanian terpadu di kabupaten pinrang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat mengenai peran pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan petani melalui program pertanian terpadu di kabupaten pinrang. Khususnya bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memberikan masukan, saran, dan evaluasi kepada semua pihak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah dan masyarakat.

3. Manfaat metodologis

Penelitian ini dapat memberikan nilai tambah dan menjadi acuan perbandingan bagi penelitian ilmiah lain yang memiliki fokus yang serupa dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dalam konteks desentralisasi, pemerintahan daerah berfungsi untuk mendelegasikan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Proses ini tidak hanya menjadi aspek administratif, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat. Dengan memberikan otonomi yang lebih besar, diharapkan kebutuhan spesifik daerah dapat lebih cepat dan efektif terpenuhi.

Desentralisasi membawa konsekuensi langsung bagi masyarakat, yang merasakan dampak positif dari pengelolaan pemerintahan yang lebih dekat dengan mereka. Menurut Rasyid (2019), pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan desentralisasi, yang menjadi landasan bagi peningkatan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Dalam hal ini, pemerintahan daerah harus mampu memahami karakteristik dan kebutuhan lokal untuk menciptakan kebijakan yang tepat.

Salah satu fungsi utama dari pemerintahan daerah adalah penyediaan layanan publik yang berkualitas. Dalam penelitian oleh Sugiarto dan Purnamasari (2021), dinyatakan bahwa pemerintah

daerah bertugas untuk memberikan berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Layanan ini sangat penting karena secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, pemerintahan daerah dapat meningkatkan kualitas hidup warga.

Kualitas layanan publik yang baik tidak hanya bergantung pada anggaran, tetapi juga pada kemampuan pemerintahan daerah untuk merespons kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem yang efisien dan responsif. Dalam konteks ini, pengawasan dan evaluasi layanan publik menjadi aspek yang tidak kalah penting. Dengan sistem yang transparan, masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik yang konstruktif.

Pembangunan ekonomi lokal juga menjadi salah satu peran penting pemerintahan daerah. Menurut Suharto (2020), pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan kebijakan yang mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kebijakan ini sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui perencanaan dan pelaksanaan program-program ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, pemerintah daerah dapat meningkatkan daya saing daerah.

Strategi pembangunan ekonomi lokal harus mencakup analisis mendalam terhadap potensi dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah perlu menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan peluang kerja yang lebih baik. Dalam hal ini, kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

Di samping itu, partisipasi masyarakat juga menjadi aspek penting dalam keberhasilan pemerintahan daerah. Menurut Setiawan (2018), tingkat partisipasi masyarakat dalam program pembangunan sangat memengaruhi hasil akhir. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan program. Melalui keterlibatan ini, kebijakan yang diambil akan lebih mencerminkan aspirasi dan kebutuhan lokal.

Keterlibatan masyarakat tidak hanya sekadar mendengarkan masukan, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, masyarakat merasa memiliki andil dalam pembangunan yang berlangsung di daerah mereka. Hal ini akan meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebijakan yang diambil.

Pemerintahan daerah juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah pusat. Agustina (2022) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil di tingkat nasional dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Sinergi antara kedua level pemerintahan ini sangat krusial dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan responsif.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus memiliki kapasitas untuk memahami dan menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat. Melalui dialog dan komunikasi yang baik, diharapkan terjadi saling pengertian antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dengan cara ini, kebijakan yang diterapkan dapat lebih bersinergi dan harmonis.

Secara keseluruhan, peran pemerintahan daerah sangat vital dalam menjamin keberlangsungan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kewenangan dan tanggung jawab yang ada memberikan peluang bagi pemerintahan daerah untuk menjadi motor penggerak pembangunan di tingkat lokal. Namun, pencapaian ini hanya dapat direalisasikan jika didukung oleh keterlibatan aktif masyarakat.

Masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan akan membantu pemerintah daerah untuk lebih memahami tantangan dan kebutuhan yang ada. Dengan demikian, program-program yang dilaksanakan akan lebih relevan dan tepat sasaran. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan juga akan mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul akibat kebijakan yang tidak sesuai.

Pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemerintah pusat tidak dapat diabaikan. Setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan responsif. Jika kolaborasi ini terjalin dengan baik, maka pembangunan yang dilakukan akan lebih berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan yang ada.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM-nya. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi aparatur pemerintahan menjadi salah satu langkah strategis untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu merancang dan melaksanakan program-program yang lebih inovatif dan efektif.

Pemerintahan daerah di Indonesia berlandaskan pada prinsip desentralisasi, yang bertujuan untuk memberikan otonomi kepada daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta

pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Desentralisasi merupakan langkah strategis yang diambil untuk mengalihkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat setempat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan dasar hukum utama bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Undang-Undang ini mengatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah diberikan otonomi untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang relevan dengan konteks lokal. Otonomi ini bukan hanya sekadar pengalihan wewenang, tetapi juga mencakup tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 1 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus dilakukan dengan mematuhi

ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan penekanan pada perlunya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini diharapkan dapat membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi objek dari kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, pembangunan yang berkelanjutan dapat dicapai.

Pemerintah daerah, melalui undang-undang ini, juga diharuskan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi bidang-bidang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Sementara itu, urusan pilihan memberikan fleksibilitas kepada daerah untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk mendorong daerah untuk lebih mandiri dan inovatif dalam mengelola sumber daya yang ada.

Selanjutnya, pentingnya pengawasan dalam pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Pengawasan yang efektif menjadi kunci untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dan pelaksanaan program berjalan dengan baik. Pemerintah daerah diharuskan untuk melaporkan kegiatan dan penggunaan anggaran kepada DPRD, yang berfungsi sebagai lembaga pengawas. DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi, serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dengan adanya mekanisme pengawasan yang efektif, diharapkan pengelolaan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan lebih baik dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pengawasan yang ketat juga dapat meminimalkan penyimpangan dalam penggunaan anggaran, sehingga dana publik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara maksimal. Melalui pengawasan, masyarakat juga mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan penting bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas

pelayanan publik. Otonomi daerah juga memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal, yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program yang dilaksanakan.

Namun, tantangan dalam implementasi masih ada. Keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas pemerintah daerah, dan infrastruktur yang tidak memadai menjadi kendala yang harus diatasi. Beberapa daerah mungkin tidak memiliki tenaga ahli yang cukup untuk merancang dan melaksanakan program yang kompleks. Selain itu, beberapa daerah juga mungkin menghadapi tantangan dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program prioritas.

Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan teknis dan pendanaan untuk membantu daerah dalam mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pemerintah pusat juga harus menyediakan pelatihan dan pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan daerah.

Selain dukungan dari pemerintah pusat, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi otonomi daerah. Masyarakat perlu diberikan ruang

untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan proses pemerintahan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dapat lebih memahami kebutuhan dan harapan warga, sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih relevan dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap program-program yang dilaksanakan.

Keberhasilan otonomi daerah juga sangat bergantung pada kepemimpinan di tingkat daerah. Pemimpin daerah yang visioner dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan mampu mengelola sumber daya daerah dengan lebih baik. Kepemimpinan yang baik dapat menginspirasi aparatur pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah yang demokratis menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel.

2.2. Program Pertanian Terpadu

Program Pertanian Terpadu merupakan pendekatan yang mengintegrasikan berbagai aspek dalam sistem pertanian untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan petani. Pendekatan ini memanfaatkan sumber daya lokal, mengoptimalkan penggunaan lahan, serta mengintegrasikan tanaman, ternak, dan agroforestri dalam satu sistem. Suwandi dan

Junaidi (2020) menjelaskan bahwa Program Pertanian Terpadu bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup petani.

Salah satu teori yang relevan dengan Program Pertanian Terpadu adalah Teori Sistem Pertanian. Menurut Campbell (2005), sistem pertanian adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi, termasuk tanaman, ternak, dan lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya melihat pertanian sebagai ekosistem yang kompleks di mana perubahan pada satu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya. Oleh karena itu, pendekatan terpadu dalam pengelolaan pertanian dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sambil mempertahankan keberlanjutan sumber daya alam.

Teori Pembangunan Berkelanjutan juga relevan dalam konteks Program Pertanian Terpadu. Menurut Brundtland Commission (1987), pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks pertanian, ini berarti mengelola sumber daya secara bijaksana untuk memastikan bahwa produksi pangan tidak merusak lingkungan dan dapat berlanjut dalam jangka panjang. Haryanto (2019) menunjukkan bahwa penerapan teknologi

pertanian yang ramah lingkungan dalam Program Pertanian Terpadu dapat mengurangi ketergantungan pada bahan kimia dan meningkatkan kesuburan tanah, sehingga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Diversifikasi tanaman dan ternak juga merupakan prinsip kunci dalam Program Pertanian Terpadu. Menurut Henson dan Heasman (1998), diversifikasi dalam pertanian dapat mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga dan serangan hama serta penyakit. Siti dan Farhan (2021) mencatat bahwa praktik diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan tetapi juga memberikan pendapatan yang lebih stabil bagi petani. Pendekatan ini membantu petani untuk memanfaatkan limbah dari satu kegiatan untuk mendukung kegiatan lainnya, seperti menggunakan limbah ternak sebagai pupuk untuk tanaman.

Partisipasi masyarakat dalam Program Pertanian Terpadu sangat krusial untuk keberhasilan implementasinya. Menurut Anwar (2022), keterlibatan petani dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap hasil yang dicapai. Hal ini sejalan dengan Teori Partisipasi yang dikemukakan oleh Arnstein (1969), yang menekankan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah elemen penting dalam menciptakan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dari segi kebijakan, dukungan pemerintah sangat penting dalam keberhasilan Program Pertanian Terpadu. Rahman dan Iskandar (2021) menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung akses petani terhadap teknologi, pelatihan, dan pembiayaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas petani. Di samping itu, penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti irigasi dan fasilitas pemasaran, juga penting agar program dapat berjalan dengan efektif. Menurut Kementerian Pertanian (2020), dukungan pemerintah dalam bentuk insentif dan penyuluhan dapat mendorong adopsi praktik pertanian terpadu.

Pengukuran keberhasilan Program Pertanian Terpadu juga perlu dilakukan untuk menilai dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan lingkungan. Sari dan Ramadhani (2023) mengemukakan bahwa indikator keberhasilan program ini meliputi peningkatan pendapatan petani, hasil pertanian, serta pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Dengan adanya evaluasi yang sistematis, akan lebih mudah untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Kendala dalam pelaksanaan Program Pertanian Terpadu juga harus diperhatikan. Menurut Mardiana dan Adnan (2022), tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, akses informasi yang rendah, dan kurangnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penting untuk membangun

jaringan kerjasama yang kuat antara petani, pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk meningkatkan efektivitas program ini.

Secara keseluruhan, Program Pertanian Terpadu menawarkan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi berbagai tantangan dalam sektor pertanian. Dengan integrasi yang baik antara berbagai komponen pertanian, diversifikasi, dan partisipasi masyarakat, program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan petani. Namun, tantangan dalam implementasi harus diatasi melalui dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat agar hasil yang optimal dapat tercapai.

2.3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Melalui Program Pertanian Terpadu di Kabupaten Pinrang

Pemerintah daerah di Kabupaten Pinrang memiliki peran sentral dalam meningkatkan kesejahteraan petani melalui implementasi Program Pertanian Terpadu. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan pertanian dalam satu sistem yang saling mendukung, dengan tujuan utama untuk meningkatkan hasil pertanian dan memastikan keberlanjutan. Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Pinrang berfungsi sebagai motor penggerak yang mengoordinasikan berbagai inisiatif dan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura memiliki tugas untuk menyusun kebijakan yang mendukung pertanian lokal. Melalui perencanaan yang matang, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Ini mencakup penentuan jenis komoditas yang akan dikembangkan, teknologi yang akan diterapkan, serta sistem pengelolaan yang akan diadopsi. Dengan demikian, Program Pertanian Terpadu menjadi alat untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan teknologi pertanian yang tepat sangat penting dalam Program Pertanian Terpadu. Pemerintah daerah mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan, seperti sistem irigasi tetes, pengendalian hama terpadu, dan penggunaan varietas unggul. Menurut Haryanto (2019), penerapan teknologi ini tidak hanya meningkatkan hasil pertanian tetapi juga melindungi sumber daya alam dari kerusakan. Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura berperan dalam mengedukasi petani tentang teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi tanpa merusak lingkungan.

Selain itu, Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura juga menyediakan pelatihan bagi petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti teknik budidaya, manajemen usaha tani, dan pemeliharaan pasca-panen. Dengan pengetahuan yang lebih baik,

petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait dengan pengelolaan lahan mereka. Suwandi dan Junaidi (2020) mencatat bahwa pelatihan yang efektif dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

Program Pertanian Terpadu di Kabupaten Pinrang juga berupaya meningkatkan diversifikasi usaha tani. Dengan mendorong petani untuk menanam berbagai jenis tanaman dan ternak, pemerintah daerah berusaha mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi harga dan serangan hama. Diversifikasi juga dapat meningkatkan pendapatan petani, karena mereka tidak bergantung pada satu jenis komoditas. Siti dan Farhan (2021) menjelaskan bahwa diversifikasi dapat membantu menciptakan ketahanan pangan yang lebih baik.

Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura juga berperan dalam memperkuat jaringan pemasaran produk pertanian. Melalui program ini, pemerintah daerah berkolaborasi dengan koperasi dan kelompok tani untuk menciptakan akses pasar yang lebih baik.³ Dengan adanya koperasi, petani dapat bernegosiasi harga yang lebih baik dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Anwar (2022) menyatakan bahwa kolaborasi ini dapat meningkatkan daya tawar petani di pasar.

Pemerintah daerah juga aktif dalam memfasilitasi akses terhadap pembiayaan bagi petani. Melalui berbagai program

bantuan dan subsidi, petani dapat memperoleh modal untuk membeli input pertanian, seperti benih dan pupuk. Rahman dan Iskandar (2021) menjelaskan bahwa dukungan finansial ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi petani. Dengan adanya modal yang cukup, petani dapat meningkatkan usaha mereka dan memperoleh hasil yang lebih baik.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam Program Pertanian Terpadu adalah keterbatasan infrastruktur. Untuk mendukung keberhasilan program, pemerintah daerah harus memperhatikan pengembangan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas penyimpanan. Kementerian Pertanian (2020) menekankan bahwa infrastruktur yang baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan mengurangi kerugian pasca-panen. Oleh karena itu, sinergi antara sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur sangat penting.

Pemerintah daerah juga harus memperhatikan aspek sosial dalam pelaksanaan Program Pertanian Terpadu. Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan program. Dengan melibatkan petani dalam pengambilan keputusan, program yang diimplementasikan akan lebih relevan dan efektif. Menurut Arnstein (1969), partisipasi aktif masyarakat dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil program.

Evaluasi dan monitoring program secara berkala juga menjadi bagian penting dari pelaksanaan Program Pertanian Terpadu. Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura perlu mengembangkan sistem evaluasi yang dapat menilai dampak program terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan lingkungan. Sari dan Ramadhani (2023) mencatat bahwa indikator keberhasilan program meliputi peningkatan pendapatan petani, hasil pertanian, dan kualitas produk. Dengan adanya evaluasi yang sistematis, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi masalah dan merumuskan kebijakan yang lebih baik.

Pemerintah daerah juga harus berperan aktif dalam menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas pelaksanaan program dan meningkatkan efektivitas intervensi. Mardiana dan Adnan (2022) menyebutkan bahwa kemitraan antara pemerintah dan pihak lain dapat meningkatkan sumber daya dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program.

Aspek keberlanjutan juga harus menjadi perhatian utama dalam Program Pertanian Terpadu. Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura perlu mengedukasi petani tentang praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti pengelolaan hama terpadu dan penggunaan pupuk organik. Dengan mempromosikan praktik yang

ramah lingkungan, program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas tetapi juga melindungi ekosistem lokal. Haryanto (2019) menekankan bahwa keberlanjutan lingkungan sangat penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang.

Salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura adalah memperkenalkan sistem pertanian terpadu yang menggabungkan tanaman dan ternak dalam satu unit usaha. Pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan meminimalkan limbah. Dengan memanfaatkan limbah ternak sebagai pupuk untuk tanaman, petani dapat mengurangi biaya input dan meningkatkan produktivitas. Suwandi dan Junaidi (2020) menyebutkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan keuntungan petani secara signifikan.

Pelibatan pemuda dalam Program Pertanian Terpadu juga sangat penting. Pemerintah daerah perlu mendorong partisipasi generasi muda dalam sektor pertanian. Dengan memberikan pelatihan dan akses terhadap teknologi, pemerintah dapat menarik minat pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan pertanian. Menurut penelitian oleh Anwar (2022), keterlibatan pemuda dapat membawa inovasi dan meningkatkan produktivitas di sektor pertanian.

Keterbukaan informasi juga merupakan aspek penting dalam keberhasilan Program Pertanian Terpadu. Dinas Tanaman Pangan

Dan Holtikultura harus memastikan bahwa petani memiliki akses terhadap informasi terkini mengenai teknik pertanian, harga pasar, dan kebijakan pemerintah. Dengan akses informasi yang baik, petani dapat membuat keputusan yang lebih cerdas terkait usaha tani mereka. Haryanto (2019) menyatakan bahwa informasi yang tepat waktu dan akurat sangat penting untuk mendukung keberhasilan usaha pertanian.

Keberhasilan Program Pertanian Terpadu di Kabupaten Pinrang tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertanian sangat penting. Kementerian Pertanian (2020) menekankan bahwa dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, sangat diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam program ini.

Di sisi lain, tantangan dalam implementasi Program Pertanian Terpadu juga harus dihadapi secara serius. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan, dan akses terhadap teknologi menjadi kendala yang harus diatasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Menurut Mardiana dan Adnan (2022), peningkatan kapasitas SDM sangat penting untuk mendukung keberhasilan program pertanian.

Dengan semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura, Program Pertanian Terpadu di Kabupaten Pinrang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan. Dengan peningkatan produktivitas, akses terhadap pasar, dan keberlanjutan lingkungan, petani tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga membangun ketahanan pangan yang lebih baik untuk masyarakat. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung petani melalui program-program ini sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Pinrang.

Gambar 2.1. Kerangka Pikir

